

PERAN BADAN KESBANGPOL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN NGADA

Petrus Del Piero Lami

NPP 30.1119

Asal Pendaftaran Kabupaten Ngada,

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : delpierolami35@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. H. Mansyur Achmad, M. Si.

ASBTRACK

Problem Statement/Background (GAP): The level of community participation in the 2020 local elections in Ngada Regency has decreased compared to 2015. This is due to the effects of the Covid-19 pandemic which has made people reluctant and afraid to come to the polls (TPS) besides that there are also some voters who are outside the area such as traveling, studying and other reasons but the person is included in the final voter list (DPT). **Purpose:** This study aims to determine the role of the KESBANGPOL Agency in increasing people's political participation in the 2020 bupati election in Ngada district and the obstacles that have occurred well as to find out the efforts made to overcome these obstacles. **Method:** The theory used is the theory of the role of government according to Sondang p. Siagian, namely the role of government as a stabilizer, innovator, modernist, pioneer and catalyst. Data collection techniques used interview techniques and documentation, then carried out the validity of the data obtained by triangulation and using data analysis techniques with data reduction, data presentation which can then be drawn conclusions. **Results/Findings:** The National Unity and Political Agency of Ngada Regency has carried out its role as a stabilizer, innovator, modernist, pioneer and catalyst through work programs and activities such as political outreach and verification of political party assistance grants in order to increase community political participation in accordance with applicable regulations and in accordance with the Strategic Plan (renstra). **Conclusion:** Overall the National Unity and Politics Agency of Ngada Regency has been consistent and maximal in carrying out its role to increase people's political participation through programs and activities in accordance with. However, due to the Covid-19 problem, several programs were not running optimally and there was a problem with public perception. Kesbangpol then made several efforts such as adding experts and normalizing office services to overcome this.

Keywords: Role, Kesbangpol Agency, Community Participation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ngada mengalami penurunan jika di bandingkan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena efek dari pandemi *covid-19* yang membuat masyarakat enggan dan takut untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) selain itu ada juga sebagian pemilih yang sedang berada diluar daerah seperti merantau, kuliah dan alasan lain namun orang tersebut masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan KESBANGPOL dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati Tahun 2020 di kabupaten ngada serta hambatan yang terjadi juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan. **Metode :** Teori yang digunakan ialah teori peran pemerintah menurut sondang p. siagian yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, moderenisator, pelopor dan katalisator. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi, kemudian dilakukan keabsahaan data yang diperoleh dengan triangulasi serta menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada telah melaksanakan perannya sebagai stabilisator, inovator, moderenisator, pelopor dan katalisator melalui program kerja dan kegiatan seperti sosialisasi politik dan kegiatan verifikasi hibah bantuan partai politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Strategis (renstra). **Kesimpulan :** Secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada telah konsisten dan maksimal dalam melaksanakan perannya guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui program-program dan kegiatan sesuai dengan. Namun karena masalah covid-19 membuat beberapa program berjalan tidak maksimal dan masalah presepsi masyarakat. Kesbangpol kemudian melakukan beberapa upaya seperti penambahan tenaga ahli dan normalisasi pelayanan kantor untuk mengatasinya.

Kata Kunci : Peran, Badan Kesbangpol, Partisipasi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia memiliki kaitannya yang sangat erat dengan pemilihan umum, atau dengan kata lain pemilihan umum menjadi Langkah awal dari sebuah demokrasi. Agar sebuah demokrasi yang baik dapat tercapai dalam pemilihan umum maka salah satu hal penting yang menjadi tolak ukurnya adalah partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik adalah sebuah bentuk keikutsertaan masyarakat biasa dalam menentukan sebuah pilihan dan keputusan yang dikemudian hari dapat mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 2005).

Saat ini yang menjadi permasalahan terkait dengan partisipasi politik yang sering terjadi pada masyarakat ialah tingginya tingkat golongan putih (golput) sebagai bentuk ketidakpuasan rakyat atas pekerjaan partai politik ataupun oleh para tokoh politik yang ditawarkan partai. Adapun niat seseorang berpartisipasi dalam politik diliputi dan dijanjikan sejumlah uang oleh seorang kader demi mendapatkan kemenangan suara. Untuk meminimalisir kejadian seperti ini perlu adanya langkah yang tegas dari pemerintah untuk mengurangi angka golongan putih dan memberikan hukuman yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku terhadap para pelaku politik uang sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai penyelenggara demokrasi.

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat dalam politik maka hal utama yang harus dikedepankan ialah tentang kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Arniti (2020) partisipasi politik, legitimasi dan sebuah demokrasi mempunyai suatu kerangka keterkaitan yang sangat erat hal ini disebabkan karena hubungan antara partisipasi politik dengan proses demokrasi selalu memberikan pengaruh yang besar terhadap legitimasi masyarakat akan jalannya suatu sistem pemerintahan. Misalnya pada pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (pemilu), masyarakat memiliki hak pilih dan kepentingan masing-masing dalam memilih para calon pemimpin kepala daerah, jika tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pilkada ini rendah maka hal itu akan berdampak pada kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan system pemerintahan, kebijakan yang di berikan belum tentu akan di jalankan karena masyarakat berpikir bahwa kebijakan ini bukanlah hal yang penting.

Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan mempengaruhi berbagai proses politik dan sistem pemerintahan. Angka golongan putih (golput) yang tinggi akan menguntungkan kandidat atau kader pemimpin yang belum tentu berkualitas dan berintegritas. Hal ini bisa berarti bahwa kandidat atau kader dapat menang dengan jumlah perolehan suara yang relative rendah serta hanya memiliki basis masyarakat yang standar karena banyak masyarakat yang memilih untuk golongan putih (golput). Ini akan berdampak pada legitimasi kekuasaan dari kader yang terpilih akan berkurang.

Dalam proses pemilihan langsung seperti sekarang kader yang menang akan merasa bahwa ia merupakan pilihan rakyat dan akan bebas melakukan apa saja yang dikehendaki, hal ini akan berdampak buruk bagi para pemilih golput karena belum tentu kader terpilih akan memperhatikan kepentingan mereka (Rusadi, 2006).

Partisipasi politik masyarakat Indonesia dapat diukur dengan cara melihat bagaimana perilaku politik masyarakatnya. Menurut Hendrik dalam (Hamid, 2020 :20) berpendapat bahwa perilaku

politik masyarakat di negara Indonesia dapat dilihat secara langsung dengan antusias dan semangat dari masyarakat yang mendatangi tempat atau lokasi pemungutan suara (TPS) pada saat berlangsungnya proses pemungutan suara. Namun hal ini bukan menjadi tolak ukur utama dalam menentukan dan melihat bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat. Secara umum berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2009 namun, tingkat partisipasi politik masyarakat Kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 dan pada tahun 2019.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pilkada tahun 2015 terdapat sekitar 454 suara tidak sah dan pada pilkada tahun 2020 jumlah suara tidak sah mengalami peningkatan yaitu pada angka 25.861 suara. Dilansir dari <https://kupang.tribunnews.com>, 19 Desember 2019, tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ngada mengalami penurunan jika di bandingkan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena efek dari pandemi *covid-19* yang membuat masyarakat enggan dan takut untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) selain itu ada juga sebagian pemilih yang sedang berada diluar daerah seperti merantau, kuliah dan alasan lain namun orang tersebut masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Tabel 1.2
Data Suara Sah Dan Tidak Sah Pada Pilkada Kabupaten Ngada
Tahun 2015-2020

No	Jenis suara	Tahun		Persentase (%)	
		2015	2020	2015	2020
1	Suara sah	76.460	86.361	86,9	76.9
2	Suara tidak sah	454	25.861		
	Jumlah	76.733	112.278		

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dan diolah penulis, 2022

Dari data di atas, pemerintah Kabupaten Ngada perlu mengatasi tingkat partisipasi politik masyarakat yang masih tergolong rendah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara via telpon dengan sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masalah yang menjadi kendala pada partisipasi politik masyarakat saat ini ialah masyarakat cenderung acuh, cuek dan terkesan kurang peduli dengan proses politik atau perkembangan politik di Kabupaten Ngada, adapun peran pemerintah dalam bidang politik yang dinilai masih kurang dirasakan secara penuh.

Dampaknya menyebabkan banyak terjadinya golput dan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ngada. Masyarakat saat ini cenderung lebih aktif terlibat dalam perkembangan proses politik melalui media-media seperti facebook, Instagram dan lainnya. Hal ini dapat berdampak buruk karena terkesan bahwa partisipasi masyarakat hanya di permukaan saja.

Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan upaya-upaya melalui program dan kegiatan serta kerja sama dengan dinas terkait atau pihak swasta dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk menarik minat semua golongan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab terhadap proses politik demi mewujudkan sebuah demokrasi yang berdaulat, adil dan makmur di Kabupaten Ngada dalam menyongsong pemilihan kepala daerah pada periode yang akan datang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul **“Peran Badan Kesbangpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Ngada.**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan hasil wawancara via telepon dengan sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, masalah yang menjadi kendala pada partisipasi politik masyarakat saat ini ialah masyarakat cenderung acuh dan terkesan kurang peduli dengan proses politik atau perkembangan politik di Kabupaten Ngada. Adapun peran pemerintah dalam politik dinilai masih kurang dirasakan secara penuh. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya golput dan rendahnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Ngada. Masyarakat saat ini cenderung lebih aktif terlibat dalam perkembangan proses politik melalui media-media seperti facebook, Instagram dan lainnya. Hal ini dapat berdampak buruk karena terkesan bahwa partisipasi masyarakat hanya di permukaan saja.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan terkait Peran Badan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik. pertama yaitu oleh Affandi Firmansyah Noor pada tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan Program Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Malang). Hasil penelitian ialah Penyelenggaraan pendidikan politik di Bakesbangpol sudah sesuai dengan Peraturan Walikota 62 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol yang tercantum dalam program tersebut. Pelaksanaan pendidikan politik dilakukan setiap tahun dengan melibatkan sharing elemen masyarakat dan generasi muda. Namun, pendidikan politik belum mampu mempengaruhi peningkatan partisipasi pemuda di Malang. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut terkait pembinaan dan pengawasan terhadap generasi muda pasca sosialisasi.

Kemudian peneliti kedua yaitu oleh Zalukhu Nestorius Nefrans pada tahun 2021 dengan judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)”, Hasil penelitian ialah Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan peranannya, dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan bisa dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat kota Medan dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020 bila dibandingkan dengan Pemilihan kepala daerah wali Kota Medan Tahun 2010 dan 2015 yang mengupayakan asas dan prinsip Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kelima penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Peneliti ingin menjadikan lima penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Peran Badan Kesbangpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Ngada. Karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Peran Badan Kesbangpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Ngada dan untuk mengetahui bagaimana cara pemberdayaan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan Peran Badan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Bupati tahun 2020 Di Kabupaten Ngada, Menganalisis faktor penghambat Badan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Bupati tahun 2020 Di Kabupaten Ngada dan mendeskripsikan upaya Badan Kesbangpol dalam mengatasi hambatan guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Bupati tahun 2020 di Kabupaten Ngada.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan begitu hasil yang telah diperoleh akan diolah menjadi suatu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan, kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai Peran Badan Kesbangpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Ngada.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Seksi dan Analis Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada dan tokoh masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peran Badan Kesbangpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Ngada menggunakan teori peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian yang memiliki 5 dimensi yaitu Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan katalisator. Adapun Pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut

3.1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Stabilisator

Pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Ngada berusaha untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan demokratis serta memastikan bahwa dilakukan dengan integritas dan transparansi, sehingga rakyat memiliki kepercayaan pada proses demokrasi serta dapat menerima hasil keputusan dengan ikhlas.

Peraturan mengenai penyelenggaraan program-program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, dimana peraturan ini menargetkan pada partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta masyarakat terutama generasi muda. Bentuk pelaksanaan dari peraturan menteri dalam negeri diatas, pemerintah Kabupaten Ngada mengeluarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2020. Mengacu pada peraturan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menguraikan dan menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis.

Berdasarkan studi dokumen yang telah dilakukan penulis dilapangan, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada tahun 2020 para pegawai telah melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan baik serta sesuai dengan standar operasional prosedur.

3.2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Inovator

Dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai inovator pemerintah dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai keseluruhan harus menempatkan posisi sebagai sumber dari sebuah hal yang baru yang membangun. hal-hal baru tersebut dapat berupa program kerja, metode kerja, sistem yang inovatif serta prosedur kerja yang dinilai dapat meningkatkan dan memperlancar urusan birokrasi agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi.

Inovasi berhubungan dengan sebuah perencanaan dalam pembangunan politik yang mencakup urusan dan keputusan-keputusan atau sebuah pilihan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Inovasi pada pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hal yang sangat penting dalam hal perencanaan guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan suatu demokrasi yang baik di Kabupaten Ngada.

Perencanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada tercantum dalam

rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada tahun 2019-2024 yang memuat gambaran keadaan masa depan yang Kabupaten Ngada yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 tahun, yang memuat sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai dalam menjalankan misi dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan kegiatan dan program-program yang bersifat strategis dan inovatif.

3.3. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Modernisator

Konsekuensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini ialah ditengah era digitalisasi menuntut adanya tenaga ahli dalam bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada, sehingga Peningkatan kemampuan baik *softskill* dan *hardskill* menjadi suatu keharusan dan kewajiban yang harus dimiliki oleh para pegawai ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun hal yang menjadi permasalahan yang ditemui penulis selama melakukan kegiatan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa masih rendahnya tenaga ahli yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan IT (Informasi Teknologi).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada dalam mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Dalam konsep digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada sampai saat ini belum bisa di implementasikan, Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor salah satunya karena ketersediaan sumber daya manusia (pegawai) yang dinilai sudah tidak lagi produktif dikarenakan faktor usia yang sudah tua. Walaupun secara teknis hal ini tidak mempengaruhi kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya namun menjadi sebuah permasalahan apabila sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu instansi pemerintah kurang mahir dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain menjadi tuntutan zaman, penguasaan dan keterampilan terhadap penggunaan internet menjadi suatu keharusan yang dimiliki setiap pegawai karena akan mempermudah pegawai dalam melakukan pekerjaan dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dan informasi.

3.4. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Pelopor

Peran pemerintah Sebagai pelopor berarti mejadi penggerak utama dalam melakukan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. pengembangan program pelatihan dan sosialisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Program pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat mengenai tata cara berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelopor memiliki tugas dan fungsi yang mengharuskannya untuk berinteraksi dan terjun langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tampil dan menjadi panutan bagi masyarakat

3.5. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai Katalisator

Pemerintah saat ini mempunyai posisi yang sangat penting sebagai katalisator dalam membangun struktur tatanan masyarakat. Tingkat kemajemukan masyarkat menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dalam mengembangkan kehidupan yang damai, adil dan sejahtera. Dalam rangka mensejahterahkan kehidupan masyarakat untuk mencapai tingkat partisipasi yang sangat maksimal terutama dalam bidang kesatuan dan politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menempatkan dirinya sebagai fasilitator untuk membantu mempercepat segala bentuk pelayanan dalam bidang kesatuan dan politik yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

Sebagai katalisator dalam pemerintah daerah hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus memiliki kemampuan dalam menganalisis dan memperhitungkan dari sudut pandang kesatuan dan politik mengenai hal-hal yang akan terjadi, terutama dalam hal mendorong partisipasi politik masyarakat. Untuk mencapai suatu perkembangan yang bersifat *fast moving enterprise* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus ikut terlibat dalam suatu proses rangkaian sistem politik namun tidak ikut terlibat dalam mengatur proses perubahan yang menyeluruh.

Pemerintah daerah Kabupaten Ngada mempunyai fungsi sebagai katalisator Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ngada maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan berbagai bantuan dan fasilitasi kepada masyarakat sebagai instrumen utama melalui berbagai jenis program dan kegiatan yang mampu memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan politik sehingga keterlibatan masyarakat dalam demokrasi yang dilakukan dapat meningkat.

3.6. Diskusi Utama Penelitian

Penulis menemukan Kewenangan dan Tantangan yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol dalam menjalankan perannya guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat terletak pada masalah anggaran yang dialihfungsikan dalam rangka penanganan masalah pandemic covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga mengakibatkan beberapa program dijalankan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Affandi Firmansyah Noor pada tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan Program Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Malang) menunjukkan hasil bahwa Penyelenggaraan pendidikan politik di Bakesbangpol sudah sesuai dengan Peraturan Walikota 62 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol yang tercantum dalam program tersebut. Pelaksanaan pendidikan politik dilakukan setiap tahun dengan melibatkan sharing elemen masyarakat dan generasi muda. Namun, pendidikan politik belum mampu mempengaruhi peningkatan partisipasi pemuda di Malang sedangkan penelitian ini memberikan sosialisasi partisipasi politik melalui pendekatan pada sekolah-sekolah SMA sebagai pemilih pemula. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zalukhu Nestrorius Nefrans pada tahun 2021 dengan judul "Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)", penelitian ini juga menemukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan peranannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan bisa dikatakan berhasil karena menggunakan pendekatan sosialisasi kepada pemilih pemula seperti pendekatan system yang digunakan dalam penelitian ini.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran konsep digitalisasi belum mampu di jalankan oleh Badan Kesbangpol kabupaten Ngada dikarenakan keterbatasan kemampuan para pegawai dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti pengelolaan internet dan computer. Kemampuan para pegawai hanya terbatas pada kemampuan word dan excel serta pengelolaan data yang belum maksimal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada telah konsisten dalam melaksanakan perannya guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui program-program dan kegiatan seperti pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, kegiatan verifikasi hibah bantuan partai politik dan kegiatan lain dalam rangka mewujudkan kehidupan demokratis dalam masyarakat sehingga keterlibatan dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses politik dapat meningkat. Program-program yang

dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada tersebut ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Ngada dan diselaraskan dengan Visi Misi pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2016-2021. Hambatan yang menghalangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada dalam menjalankan tugas dan perannya guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut meliputi pandemi Covid-19, ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan, serta persepsi masyarakat bahwa politik tidak penting. Pandemi Covid-19 memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada melakukan normalisasi pelayanan kantor. Selama pandemi Covid-19, pelayanan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dalam rangka memastikan keamanan dan kesehatan staf serta pengunjung, dengan semakin meningkatnya vaksinasi dan penurunan angka kasus Covid-19, diperlukan normalisasi pelayanan kantor di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memastikan keberlangsungan program dan pelayanan publik.

Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada melakukan penambahan tenaga kontrak yang memiliki latar belakang pendidikan politik dan kemampuan yang baik di bidang teknologi guna memperlancar pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Ngada sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Peran Pemerintah menurut Sondang P. Siagian yang memiliki 5 dimensi yaitu Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan katalisator

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Badan Kesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Ngada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada dan Organisasi Masyarakat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilpartisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar dan Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar". Bali: JIDS
- Firmansyah, N. 2018. "Pelaksanaan Program Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Malang)". Malang: UMM.
- Hamid, I.2020. Perilaku Politik Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth. Sanabil. Mataram
- <https://kupang.tribunnews.com>. *Partisipasi Pemilih Di Ngada Menurun Warga Tak Gunakan Pilih Ada Apa*.19 Desember 2020.
- <https://www.bps.go.id/>. *Statistik Politik Tahun 2019*. 17 Desember 2021.
- Rusadi, K. 2006. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Sinar baru algesindo. Jakarta
- Surbakti, R. 2005. Memahami Ilmu Politik. Grasindo. Jakarta.
- Siagian, S. 2016. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Bumi Aksara. Jakarta.
- Zalukhu, N. 2021," Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)", Medan: UHN.



